



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO MENTERI KEUANGAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TENTANG**

**JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN 2023 BESERTA NOTA KEUANGANNYA  
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022**

---

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, beserta Nota Keuangannya.

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 23 Agustus 2022 yang lalu.

Perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan dan pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang disampaikan oleh Bapak H. Abidin Fikri **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, Bapak Dave Akbarshah Fikarno **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, Bapak H. Mulyadi **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, Bapak Ary Egahni Ben Bahat **Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Partai Nasdem)**, Ibu Ela Siti Nuryamah **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, Bapak H. Irwan **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, Bapak H. Sukamta **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, Bapak Ahmad Yohan **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan Bapak Muhammad Aras **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**.

**Pimpinan dan Hadirin yang kami muliakan,**

RAPBN 2023 dirancang dengan semangat **optimisme namun tetap waspada**. Optimisme dilandasi oleh pemulihan ekonomi hingga triwulan kedua yang tumbuh mengesankan yaitu 5,44%. Tingkat pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN, dimana banyak negara-negara maju dan negara *emerging* justru mengalami revisi pertumbuhan menurun akibat tekanan inflasi dan pengetatan

kebijakan moneter. Sementara itu inflasi Indonesia masih berada di tingkat moderat 4,94% pada bulan Juli 2022.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi yang melaju kencang. Hal ini menggambarkan pemulihan mobilitas masyarakat disertai daya beli terutama kelompok menengah atas yang diaktualisasikan. Sementara ekspor tetap tumbuh tinggi akibat harga dan permintaan komoditas yang kuat.

Kinerja pertumbuhan dan inflasi hingga Semester-I 2022 memberikan landasan optimisme. Namun kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda perekonomian Eropa, Amerika Serikat, dan RRT.

Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia, dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia. Kenaikan suku bunga juga menyebabkan gejolak di pasar uang dan arus modal ke luar dari negara-negara berkembang dan *emerging*. Ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa suku bunga disesuaikan ke atas. Dampak rambatan global ini dapat mengancam ekonomi Indonesia dalam bentuk tekanan harga (inflasi), pelemahan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

APBN 2023 kembali akan dihadapkan pada tantangan dan tugas berat yaitu menjadi pelindung (*shock absorber*) bagi masyarakat, ekonomi, dan negara. Kita menyadari bahwa sejak terjadinya pandemi di 2020, APBN telah dan terus bekerja sangat keras (*extraordinary*) untuk melindungi rakyat dan perekonomian yang menyebabkan defisit meningkat tajam. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% PDB merupakan wujud keseimbangan antara

menggunakan APBN sebagai instrumen pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat - namun pada saat yang sama konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten. Ini menjadi strategi menjaga keberlangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi di satu sisi dan di sisi yang lain menjaga keberlangsungan (sustainability) APBN itu sendiri.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Menanggapi pandangan **seluruh Fraksi** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi di dalam RAPBN tahun 2023, Pemerintah sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 harus tetap dijaga sebagai momentum perbaikan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan adil serta merata. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 yang disusun, telah mencerminkan hasil pembahasan pendahuluan dengan DPR dan pada saat yang sama telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi global yang sangat dinamis.

Pemerintah akan melakukan koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan agar mampu menyembuhkan *scarring effect* di perekonomian akibat pandemi. Pada saat yang sama akan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi makin kuat dan meningkatkan produktivitas.

Asumsi pertumbuhan 5,3% masih dalam rentang pembahasan awal dengan DPR dan sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional dan analisis pasar. Namun kita tetap harus waspada terjadinya kemungkinan risiko pelemahan ekonomi global yang dapat berimbas pada kinerja ekonomi nasional. Permintaan domestik dari segi

konsumsi dan investasi harus dijaga momentum pemulihannya, sementara pemerataan pertumbuhan antarpulau, antardaerah, antarsektor harus terus diupayakan.

Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah akan menjaga inflasi di dalam negeri tetap terkendali. Pemerintah berterima kasih atas perhatian dari **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKS, dan F-PPP** terhadap upaya mengendalikan laju inflasi, di tengah meningkatnya tekanan inflasi global, terutama pada komoditas energi dan bahan pangan.

Laju inflasi pada bulan Juli 2022 masih relatif moderat yaitu 4,94%. Bahkan angka tersebut relatif rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di beberapa negara G20 seperti Turkiye dan Argentina yang mencapai masing-masing 79,6% dan 71,0%. Brazil, Meksiko dan India juga mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi di bulan Juli, masing-masing mencapai 10,1%, 8,2%, dan 6,7%.

Dihadapkan pada krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga-harga melonjak, APBN berusaha maksimal untuk meredam *shock* yang luar biasa ini. Akibatnya tahun 2022 ini belanja subsidi dan kompensasi untuk energi melonjak sangat tinggi. Kemampuan APBN menjadi *shock absorber* harus didukung oleh gotong royong seluruh pihak agar tetap dapat *sustainable*. Selain itu, perlindungan APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial harus terus diperhatikan agar tepat sasaran yaitu bagi mereka yang benar-benar rentan dan membutuhkan.

Menghadapi gejolak dan tekanan eksternal kita harus semakin kompak, bersama saling menjaga dan melindungi, dengan memanfaatkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter secara sinergis, tepat ukuran dan waktu agar terjaga kredibilitas, kesinambungan, dan

efektivitasnya. Tantangan gejolak dunia masih cukup panjang, kita harus mampu membangun ketahanan pangan dan energi agar mampu melindungi perekonomian dan rakyat dari ketidakpastian global dan ancaman inflasi yang sangat nyata.

### **Hadirin yang saya muliakan,**

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Demokrat, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN,** dan **F-PPP** terkait target perpajakan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Penerimaan perpajakan diharapkan tetap dapat optimal dalam mendukung konsolidasi fiskal sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang semakin membaik dan efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Perpajakan di satu sisi merupakan sumber utama penerimaan negara, namun disisi lain menjadi instrumen kebijakan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian.

Pemerintah memandang bahwa target penerimaan pajak untuk tahun 2023 dirancang dengan hati-hati dan waspada. Dengan risiko resesi ekonomi global yang meningkat, harga komoditas dan *windfall* penerimaan harus menyesuaikan. Pada saat yang sama, reformasi perpajakan dengan pemberlakuan UU HPP serta perbaikan dan penyederhanaan layanan pembayaran pajak diharapkan akan menjaga kesinambungan penerimaan pajak. Instrumen perpajakan juga terus digunakan sebagai insentif untuk mendorong pertumbuhan dan investasi.

Dari sisi PNBPN, Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PDIP, F-Partai Gerindra,** dan **F-PAN** bahwa penetapan target PNBPN perlu didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan peran PNBPN. Pengelolaan PNBPN terus diupayakan

semakin baik termasuk perbaikan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan pendekatan peningkatan nilai tambah dan kelestarian lingkungan di tengah fluktuasi harga komoditas. Upaya peningkatan inovasi dan kualitas layanan Kementerian/Lembaga dan BLU tetap diprioritaskan yang diperkuat dengan perbaikan regulasi, perbaikan administrasi, serta sinergi antar-Lembaga.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, dan F-PKS** agar belanja pada tahun 2023 benar-benar dirancang dengan baik sehingga lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan belanja RAPBN Tahun 2023 diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif (*spending better*); (2) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; (3) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; (4) melanjutkan reformasi birokrasi; (5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan (6) mengembangkan ekonomi hijau.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia, Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Gerindra, F-PKB, dan F-Partai Demokrat**. Kebijakan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2023 ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi, antara lain difokuskan pada: (1) peningkatan akses seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan Pendidikan: beasiswa afirmasi, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kuliah; (2) peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras; (3) Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja melalui pembentukan *teaching factory*, dan *science techno park*; (3) pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru; serta (4) penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk mendukung PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Terkait anggaran kesehatan, Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS,** dan **F-PAN**, bahwa alokasi belanja kesehatan perlu dikawal agar target pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dapat terealisasi. Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** agar Pemerintah fokus mengatasi masalah *stunting* di Indonesia. Dapat disampaikan bahwa program percepatan penurunan *stunting* juga menjadi upaya esensial terhadap pembangunan generasi muda sebagai bagian Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Intervensi yang bersifat multidimensional dan lintas sektoral dilaksanakan Pemerintah sehingga membuahkan hasil yang cukup baik dengan penurunan angka prevalensi *stunting* menjadi 24,4 % pada tahun 2021 dari semula 30,8 % pada tahun 2018.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** dan **F-PKS** untuk tetap memberikan perhatian terhadap program perlindungan sosial



dalam rangka membantu masyarakat miskin dan rentan terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dalam rangka peningkatan efektifitasnya untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Pandangan **F-Partai Demokrat** untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*.

Pada RAPBN tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta kembali melakukan akselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah optimis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menysasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PAN**, bahwa penyaluran subsidi energi perlu dilakukan secara tepat sasaran. Pada tahun 2022, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, gap antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah semakin besar. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak 3 kali lipat mencapai Rp502,4 triliun. Dengan trend harga minyak dunia, kurs rupiah dan konsumsi Pertalite dan Solar yang sangat besar melebihi kuota APBN, jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 Triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023.

Dengan jumlah subsidi dan kompensasi yang sangat besar tersebut, yang justru menikmati adalah kelompok mampu. Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5% subsidi Solar dan 20% subsidi Peralite. Ini akan mengakibatkan kesenjangan makin tinggi dalam masyarakat kita.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan, serta yang memang membutuhkan bantuan. Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencari paduan kebijakan yang optimal untuk mencapai keseimbangan tujuan: (1) melindungi masyarakat miskin dan rentan, (2) menjaga proses pemulihan ekonomi dan (3) melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN.

### **Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan,**

Menanggapi pernyataan dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, dan F-PKS** mengenai alokasi Transfer ke Daerah pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp811,7 triliun harus dapat menjadi alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada tahun 2023, alokasi TKD mengalami kenaikan dibandingkan alokasinya pada tahun 2022. Kenaikan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Untuk mendorong pengelolaan TKD yang lebih baik, diperlukan perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang memadai. Untuk itu, sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah perlu tetap diperkuat, sehingga kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tepat sasaran dan sejalan dengan prioritas nasional secara keseluruhan.

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN** dan **F-PPP** yang terus mengingatkan Pemerintah untuk semakin kreatif mengembangkan skema pembiayaan anggaran mengingat kondisi perekonomian tahun 2023 masih akan dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi akibat lonjakan inflasi dan kenaikan harga komoditas.

Dengan kecenderungan inflasi tinggi yang menyebabkan suku bunga global meningkat tajam hingga tahun 2023, maka pengelolaan utang dan pembiayaan harus makin waspada dan hati-hati. Arah defisit APBN 2023 yang mengecil di bawah 3 % PDB - selain memenuhi Amanat UU 2/2020 dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengenai batas maksimal defisit APBN, juga merupakan langkah yang strategis dan tepat dalam menghadapi tantangan di atas.

Pemerintah akan terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang efisien, sumber pembiayaan yang aman, dan pendalaman pasar obligasi dalam negeri yang mampu menjaga stabilitas

instrumen obligasi negara secara berkelanjutan. Koordinasi bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS akan terus diperkuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang makin menantang.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari **Fraksi PDIP, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat** dan **F-PKS**, tentang Pembiayaan investasi yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur, dapat disampaikan bahwa Pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar gap infrastruktur dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Pemberian PMN kepada BUMN dan investasi pemerintah melalui BLU dilakukan secara selektif dan berkesinambungan serta memperhatikan dukungan ke berbagai sektor termasuk sektor pariwisata, mendorong ekspor, mendukung UMKM dan sektor pangan serta ekonomi hijau. Pembangunan proyek infrastruktur merupakan bagian tak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi nasional karena proyek infrastruktur dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi PDIP, F-Partai Demokrat** dan **F-PKS** bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus dilaksanakan dengan perhitungan yang seksama, mendalam, komprehensif, dan hati-hati, dengan memperhitungkan kapasitas dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai wujud pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif, Pemerintah mengembangkan skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), skema keikutsertaan pihak lain, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kontribusi swasta.

### **Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan,**

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan kembali bahwa pada tahun 2022 ini, hampir semua negara di dunia dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi yang cukup tajam. Pemerintah terus melaksanakan prinsip gotong royong dalam rancangan APBN yang menjadi instrumen *shock absorber*. Target sasaran perlindungan sosial dan subsidi harus tertuju bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu. Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan.

Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun. Angka ini akan dibagikan dalam tiga jenis. Pertama, senilai Rp12,4 triliun berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150.000 selama 4 bulan atau total sebesar Rp600.000 yang akan di berikan 2 kali. Kedua, sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Ketiga, berupa bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi antara lain membantu angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta bansos tambahan.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI berkenaan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya. Tanggapan atas Pemandangan Umum yang lengkap dan

terinci kami sampaikan juga secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisah dari jawaban yang kami sampaikan saat ini.

Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Semoga Allah membimbing kita bersama melalui masa-masa berat ini dan mengokohkan tali ikatan kita sebagai bangsa yang makin maju dan berdaulat. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

***Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq***

*Dan Allah adalah Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya.*

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**Jakarta, 30 Agustus 2022**

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan,**

**Ttd**

**Sri Mulyani Indrawati**